



EDISI KAMIS 09 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTODAY

Usai PM Modi, Thaksin Shinawatra Sowan Malam-malam ke Kertanegara

04

NUSANTARA

Korupsi Blackout Sumatera hingga Asabri, Polisi Geledah 8 Lokasi

10

LISTSTYLE

Underpainting Makeup, Teknik Viral Bikin Hasil Menyatu dengan Kulit

UTAK-ATIK BIAYA HAJI 2027

Total Rp107 Juta, Jemaah Bayar Rp42,8 Juta

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah.

Angka itu lebih tinggi dibanding musim sebelumnya. Kenaikan dipicu melonjaknya biaya avtur, tiket penerbangan, serta akomodasi tenda masyair di Arab Saudi. Namun, pemerintah mengubah skema pembiayaan. Porsi biaya yang ditanggung jemaah dipangkas, sedangkan kontribusi Nilai Manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diperbesar. Melalui skema baru 40:60, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah diperkirakan sekitar Rp42,8 juta atau 40 persen dari total biaya. Sisanya, sekitar Rp64,2 juta atau 60 persen, akan ditutup dari Nilai Manfaat BPKH. Komposisi itu berbanding terbalik dengan musim haji sebelumnya. Saat itu, jemaah menanggung sekitar 62 persen biaya, sedangkan Nilai Manfaat hanya menutup 38 persen. Dalam simulasinya, peningkatan porsi Nilai Manfaat dimungkinkan karena adanya akumulasi dana yang tidak terpakai selama pandemi COVID-19 pada 2020-2022. Meski demikian, usulan tersebut masih bersifat indikatif. Pemerintah akan membahas dan menyisir kembali komponen biaya bersama Panitia Kerja Komisi VIII DPR sebelum besaran BPIH 2027 ditetapkan secara final. BACA HAL 11...

BIAYA HAJI REGULER (PER TAHUN)

Tahun 2027*

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 107,34 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
±Rp42,94 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
±Rp64,40 juta

Tahun 2025

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 89,41 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
Rp 55,43 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
Rp 33,98 juta

Tahun 2026

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 87,40 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
Rp 54,10 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
Rp 33,30 juta

Tahun 2024

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 93,41 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
Rp 56,04 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
Rp 37,36 juta

Sumber :
Berbagai sumber
Diolah

Tahun 2023

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 90,00 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
Rp 49,90 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
Rp 40,20 juta

KET
(*Proyeksi/Estimasi)

Tahun 2022

Total Biaya Haji (BPIH)
Rp 97,79 juta

Dibayar Jemaah (BIPih)
Rp 39,89 juta

Subsidi Nilai Manfaat (BPKH)
Rp 57,91 juta





RI-India Bergandengan Revitalisasi Prambanan

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi meluncurkan kerja sama revitalisasi Candi Prambanan. Proyek ambisius ini ditandai dengan kunjungan langsung kedua pemimpin negara ke kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia tersebut pada Rabu, (8/7/2026). Kolaborasi ini diwujudkan melalui kesepakatan bertajuk "Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation". (ist.setpres)

USAI PM MODI, THAKSIN SHINAWATRA SOWAN MALAM-MALAM KE KERTANEGARA

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bersama keluarganya di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026) malam. Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan agenda diplomatik dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Presiden sebelumnya melepas keberangkatan Modi di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) setelah rangkaian kunjungan resmi pemimpin India tersebut ke Indonesia.

Usai agenda tersebut, Prabowo kemudian menerima Thaksin yang datang bersama keluarga. Kehadiran mantan pemimpin Thailand itu disebut menjadi bagian dari komunikasi dan hubungan persahabatan yang telah terjalin lama antara keduanya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Ia menyebut Thaksin datang bersama putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada periode 2001-2006.

"Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarga di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, pada Rabu malam, 8 Juli 2026," kata Teddy dalam



Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatram beserta keluarganya. (Dok. IG Setkab)

keterangannya.

Menurut Teddy, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pertukaran pandangan mengenai berbagai perkembangan internasional dan kondisi kawasan.

"Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum untuk mempererat persahabatan yang telah terjalin lama. Dalam suasana santai,

Bapak Presiden dan Thaksin juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global serta dinamika kawasan," ujarnya.

Meski pemerintah tidak menjelaskan secara rinci topik yang dibicarakan, pertemuan Prabowo dan Thaksin berlangsung ketika kawasan Asia Tenggara menghadapi sejumlah perubahan geopolitik.

Isu stabilitas kawasan,

perkembangan ekonomi global, hubungan antarnegara Asia, hingga tantangan kerja sama regional menjadi sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia dan Thailand merupakan dua negara dengan peran penting di kawasan. Keduanya menjadi anggota utama ASEAN yang selama ini menjadi wadah kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan regional.

Komunikasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Thaksin juga dinilai menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan diplomasi informal Indonesia di tengah perubahan tatanan global.

Thaksin Shinawatra merupakan salah satu figur politik paling berpengaruh dalam sejarah modern Thailand. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001 hingga 2006 sebelum pemerintahannya berakhir setelah kudeta militer.

Selama memimpin Thailand, Thaksin dikenal dengan sejumlah kebijakan ekonomi populis yang menargetkan masyarakat pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah. Program-program pemerintahannya membuat basis politik keluarga Shinawatra memiliki pengaruh kuat di Thailand.

Setelah meninggalkan pemerintahan, pengaruh politik Thaksin tetap bertahan melalui jaringan politik yang kemudian melahirkan sejumlah pemimpin dari keluarga Shinawatra, termasuk putrinya Paetongtarn. (Ist,rls/dya)

PANJA RUU PEMILU MANDEK, KOMISI II BUKA-BUKAAN INSTRUKSI PIMPINAN

Teka-teki mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akhirnya terjawab. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat membongkar alasan di balik mandeknya regulasi krusial tersebut. Pimpinan DPR meminta mereka menunda pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, membeberkan instruksi itu. Sejak awal Januari 2026, sebagai Ketua Komisi II DPR RI, ia mengaku mengajak empat wakilnya menghadap pimpinan DPR. Koordinasi dilakukan sebelum dirapatkan formal dalam rapat



(Ilustrasi) Petugas melewati papan nama KPU. ist

PUTUSAN MK JADI DASAR REVISI UU PEMILU

Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

- Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024
- Pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dipisahkan dari pemilu daerah (Pilkada dan DPRD).
- Jeda pelaksanaan 2-2,5 tahun.
- Ditargetkan mulai berlaku pada Pemilu 2029.

Parliamentary Threshold Dirombak

- Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023
- Ambang batas parlemen 4% dinilai tidak memiliki kepastian hukum.
- DPR diminta merumuskan besaran threshold baru sebelum Pemilu 2029.

Pilkada Tetap Dipilih Langsung

- Putusan MK No. 195/PUU-XXIV/2026
- MK menolak usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
- Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Kuota Perempuan Minimal 30%

- Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026
- Setiap dapil wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%.
- Parpol yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi gugur.

Aturan Baru Pencalonan Kepala Daerah

- Putusan MK No. 60 & 62/PUU-XXII/2024
- Partai politik tanpa kursi DPRD tetap dapat mengusung calon.
- Syarat didasarkan pada persentase suara sah, bukan hanya jumlah kursi.

pimpinan DPR yang dilakukan setiap bulan.

"Saya tanya kepada pimpinan DPR, apakah Panja itu berkenan dibentuk saat ini atau kami harus menunggu momentum politik dan momentum legislasi yang kami tentu taat kepada tata tertib dan mekanisme yang ada di DPR? Jawabannya: 'Tunggu'. Begitu saya tanya kapan, jawabannya: 'Tunggu'," kata Rifqi dalam diskusi

bertajuk Prospek Demokrasi Elektoral 2029: Telaah atas Revisi UU Pemilu di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Sebagai gantinya, pimpinan DPR mengarahkan Komisi II untuk mendahulukan tugas legislasi lain yang dianggap mendesak. "Atas arahan dari pimpinan DPR, kita dahulukan RUU Adminduk," imbuh politikus Partai NasDem tersebut. Targetnya

Kritik Tajam 'Jalan di Tempat'

kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Uceng mengingatkan agar pembuat kebijakan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam merancang aturan pemilu. "Saya harus sampaikan ini di awal karena saya mau billing bahwa, jangan sampai kita menjadi orang yang lebih bodoh dari keledai. Kita sudah jatuh di lubang yang sama terus berkali-kali," tuturnya.

Menurutnya, salah satu penyebab utama kemandekan ini adalah fenomena oposisi formal di parlemen yang seharusnya menjadi pengimbang keinginan eksekutif.

Senada dengan Uceng, pakar hukum pemilu Titi Anggraini memandang penundaan ini sebagai fenomena dejavu yang buruk. Ia menyebutnya sebagai bentuk kelalaian legislatif yang disengaja.

"Itulah yang saya sebut dengan legislative inaction. Ketika pembentuk undang-undang dalam hal ini, parlemen, DPR, DPD, melepaskan tanggung jawab konstitusional dan fungsionalnya

untuk merumuskan hukum, memperbaiki hukum," ucap Titi.

Titi menilai DPR, DPD, dan Pemerintah secara sadar telah melepaskan tanggung jawab untuk memperbaiki hukum pemilu, padahal ada kebutuhan objektif yang mendesak pasca-Pemilu 2019. Ia juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang kerap mengambil jalan pintas melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang meminimalkan partisipasi masyarakat, alih-alih melakukan revisi secara transparan.

Di sisi lain, pimpinan DPR menepis anggapan bahwa mereka mengabaikan revisi aturan pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan parlemen tidak akan terburu-buru. Ia menjamin seluruh tahapan pemilihan umum tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun masih menggunakan undang-undang yang lama.(wid,ist/dya)

adalah mewujudkan sistem Single Identity Number berbasis pengenalan wajah (face recognition).

Penundaan ini membawa risiko besar. Tahapan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode baru akan dimulai pada Oktober 2026. Rifqi menyadari bahaya tersebut jika pembahasan substansi terus ditunda. "Tapi saya bilang satu hal, kalau RUU Pemilu tidak kita garap, kita akan berpotensi nanti masuk dalam satu tahapan penting di akhir 2026 yaitu seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI pada bulan Oktober 2026. Sehingga kemudian kita harus melakukan ijtihad atau terobosan," jelasnya.

Menyiasati kebuntuan prosedur, Komisi II melakukan apa yang ia sebut sebagai "ijtihad ketatanegaraan" atau terobosan pro-rakyat. Sejak Januari, mereka rutin mengundang pakar, akademisi, hingga LSM setiap dua minggu sekali untuk menyerap aspirasi.

"Itu ijtihad Pro-people. Kalau pakai Tatib (Tata Tertib) DPR, mekanismenya Panja dibentuk dulu baru panggil orang. Tapi kami melakukan ijtihad ini agar memenuhi meaningful participation sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Kami memberanikan diri menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) lebih awal," ungkap Rifqi.

Dari kajian itu, Komisi II melahirkan 28 DIM yang dilengkapi dengan tiga alternatif norma. Seluruh DIM tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada Juni 2026 lalu.

"Waktu itu sambil bertanya kepada pimpinan DPR: apakah ini akan tetap di Komisi II ataukah diubah menjadi Pansus atau dengar-dengar katanya mau diserahkan kepada pemerintah? Dijawab oleh pimpinan DPR: tetap di Komisi II, dan beliau mengapresiasi karena kami sudah bekerja," kata Rifqi.

Meski demikian, kapan pembahasan resmi dimulai, ia belum tahu. "Nah itu perkembangannya, tapi kapan, wallahu 'alam bisshawab," pungkasnya. Sikap pimpinan DPR yang menahan RUU Pemilu memicu alarm kewaspadaan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman, mengendus adanya potensi constitutional engineering atau rekayasa konstitusi yang dibalut alasan efisiensi anggaran serta pencegahan kegaduhan.

"Isu yang berkembang dalam kaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu ini adalah akan dibuat constitutional engineering, rekayasa konstitusi," kata Benny dalam diskusi yang sama.(gus,rls,blu/dya)

LAMBATNYA proses revisi UU Pemilu ini memicu kritik keras dari para akademisi dan pakar hukum. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai proses legislasi di DPR saat ini tidak menunjukkan kemajuan berarti.

"Jadi kita seperti lari di treadmill, berkerlingat banyak, tapi kemudian tidak bergerak dari tempat itu juga,"

Korupsi Blackout Sumatera hingga Asabri, Polisi Geledah 8 Lokasi

Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menggeledah delapan lokasi di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berhubungan dengan peristiwa blackout di Sumatera, perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Dua lokasi yang digeledah berada di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Yakni restoran de'Clan dan Point Money Changer. Hingga sekitar pukul 17.00 WIB, personel Brimob bersenjata masih berjaga di sekitar kedua lokasi selama proses penggeledahan berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dean Mackbon, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam tiga perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi, tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap," kata Victor di lokasi.

Victor menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan penanganan hukum perkara PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya dalam kurun



Personel Brimob berjaga di depan salah satu kafe saat berlangsungnya penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta, Rabu (8/7/2026). ant

2020 hingga 2025.

Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian pembayaran PT CBS kepada PT KNO yang diduga melibatkan penyelenggara negara pada periode yang sama.

Di sisi lain, Kortastipidkor Polri

menyatakan penggeledahan juga menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sepanjang 2018-2026. Perkara itu diduga berkaitan dengan insiden blackout yang terjadi di Sumatera.



Penampakan uang valas yang disita saat penggeledahan de'Clan di Cipete, Jakarta Selatan. Foto: Dok. Istimedia

Selama penggeledahan di Kafe de'Clan, penyidik menemukan uang tunai dalam jumlah besar dengan berbagai mata uang asing. Seluruh uang tersebut diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan semua pihak agar tidak menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Kami menyampaikan kepada siapa pun yang mencoba menghalang-halangi dalam proses penyidikan, dapat diproses berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Budi di lokasi penggeledahan.

Menurut Budi, penggeledahan terhadap Kafe de'Clan merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU yang ditangani bersama oleh Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. (gus,ist,kum/dya)

Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual terhadap anak di kawasan lokalisasi Tenda Biru, Cibitung, Kabupaten Bekasi, mengungkap praktik yang diduga telah berlangsung secara sistematis selama bertahun-tahun. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya empat kafe karaoke diduga mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Dari aktivitas ilegal tersebut, para pelaku diperkirakan meraup keuntungan ekonomi hingga sekitar Rp1,7 miliar dalam kurun tiga tahun.

Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, mengatakan para korban direkrut untuk bekerja sebagai ladies companion (LC) di kafe karaoke. Mereka diwajibkan menemani tamu bernyanyi, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga akhirnya dipaksa melayani hubungan seksual dengan pelanggan.

Tarif yang dikenakan kepada tamu berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu setiap transaksi, sedangkan

Terungkap! 3 Tahun Beroperasi, Prostitusi Anak di Cibitung Raup Rp1,7 M



Barang bukti terkait pengungkapan kasus dugaan TPPO dan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak perempuan di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Barat di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

korban hanya menerima bagian sekitar Rp100 ribu dalam bentuk tip. Sebagian besar keuntungan diduga dinikmati pengelola dan jaringan pelaku.

"Dari hasil penyidikan, para tersangka diduga bersama-sama melakukan perekrutan, penempatan, mempekerjakan korban, hingga memperoleh keuntungan ekonomi sekitar Rp1,7 miliar dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun," ujar

Rita saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (8/7).

Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan penyidik setelah beredar unggahan viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, seorang warga negara asing (WNA) menceritakan dugaan praktik prostitusi anak di wilayah Jakarta dan Bekasi. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses

profiling dan penyelidikan mendalam hingga mengarah ke kawasan lokalisasi Tenda Biru di Cibitung. Meski informasi awal tidak seluruhnya terbukti, penyidik justru menemukan indikasi kuat praktik eksploitasi seksual dan perdagangan anak yang telah berlangsung cukup lama.

Dalam operasi pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 37 orang. Delapan di antaranya merupakan anak yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual di kawasan Cibitung. Para korban langsung dievakuasi ke rumah aman (safe house) untuk mendapatkan perlindungan, pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, UPT PPA, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat guna memastikan seluruh hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung. (Gus,ist/dya)

POTENSI FRAUD BPJS KESEHATAN DISEBUT CAPAI RP6 TRILIUN

BPJS Kesehatan meminta penguatan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah potensi tindak kecurangan atau fraud dalam ekosistem pembiayaan pelayanan kesehatan nasional. Langkah tersebut dilakukan seiring besarnya dana yang dikelola BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp190 triliun setiap tahun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Prihati Pujowaskito mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/7), untuk melakukan audiensi terkait upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prihati mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah strategi pencegahan, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga mekanisme pengawasan terhadap potensi kecurangan dalam sistem pembiayaan pelayanan kesehatan.

"Di dalamnya banyak hal-hal yang akan kita lakukan terkait dengan edukasi, sosialisasi, pencegahan, dan penindakan fraud di lingkungan ekosistem pembiayaan pelayanan kesehatan oleh BPJS," ujar Prihati di Gedung Merah Putih KPK.

Menurutnya, besarnya dana yang dikelola BPJS Kesehatan membuat aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Dana tersebut berasal dari iuran peserta dan digunakan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat melalui program JKN.

"Ini perlu suatu tata kelola dan integritas yang tinggi. BPJS bertanggung jawab untuk memanfaatkan satu rupiah pengumpulan dana ini untuk sebesar-besarnya keperluan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN," kata Prihati.

Saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 286 juta orang atau hampir 98 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut membuat pengelolaan dana kesehatan nasional membutuhkan sistem pengawasan yang ketat.

"Pesertanya sudah 286 juta, hampir 98 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Ini hal yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Perkuat Kerja Sama dengan KPK

Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan lembaga antirasuah melalui nota kesepahaman. Audiensi kali ini menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama tersebut untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Dalam pertemuan itu, BPJS Kesehatan dan KPK membahas sejumlah instrumen penguatan integritas, antara lain penyusunan Corruption Risk Assessment (CRA), penguatan peran Penyuluh



BPJS Kesehatan melakukan audiensi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Antikorupsi, penyusunan Panduan Pencegahan Korupsi (Pancek), serta pengembangan Whistleblowing System (WBS).

Melalui sistem tersebut, BPJS Kesehatan berharap potensi penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah sebelum

menimbulkan kerugian yang lebih besar.

"Beberapa hal itu yang akan dilakukan sehingga ini bisa menambah integritas BPJS Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan satu rupiah pun untuk kepentingan pembiayaan kesehatan..

Dalam kesempatan tersebut, Prihati juga mengungkapkan adanya potensi fraud dalam ekosistem pembiayaan kesehatan BPJS yang nilainya pernah disebut mencapai sekitar Rp6 triliun.

Namun, ia menegaskan angka tersebut telah mengalami penurunan karena berbagai upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan bersama berbagai pihak.

"Semua berusaha mengurangi, kerja sesuai regulasi supaya fraud-nya turun. Angkanya sudah enggak seperti itu ya, turun. Barangkali mungkin sekitar Rp6 triliun, sudah enggak, enggak sebesar itu," ujar Prihati.

Ia menjelaskan, potensi kecurangan dalam sistem jaminan kesehatan tidak hanya berasal dari satu pihak, melainkan dapat melibatkan berbagai unsur dalam rantai pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga proses administrasi pembiayaan.(wid ist/dya)

KONDISI KEUANGAN BPJS KESEHATAN 2025

- Pendapatan iuran JKN
Rp 176,72 triliun
- Biaya pelayanan kesehatan
Rp 191,33 triliun
- Selisih (defisit operasional)
Rp 14,61 triliun
- Pertumbuhan pendapatan iuran
6,88 Persen
- Pertumbuhan biaya pelayanan
8,64 Persen
- Kolektibilitas iuran
99,49 Persen



Kembali Defisit, Iuran Potensi Naik?

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menghadapi tekanan keuangan setelah biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan pada 2025 melampaui pendapatan iuran peserta. Kondisi tersebut memunculkan kembali kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembiayaan JKN sekaligus membuka wacana perlunya penyesuaian skema pendanaan di masa mendatang.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, sepanjang 2025 biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,33 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp176,72 triliun, sehingga terjadi selisih pembiayaan sekitar Rp14,61 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengakui meningkatnya biaya pelayanan

menjadi tantangan bagi keberlanjutan Program JKN. Namun, menurutnya kondisi tersebut juga menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pendapatan iuran JKN pada 2025 sebenarnya masih tumbuh sekitar 6,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp165,34 triliun menjadi Rp176,72 triliun. Tingkat kolektibilitas iuran juga meningkat dari 99,17 persen menjadi 99,49 persen.

Meski demikian, pertumbuhan penerimaan tersebut belum mampu mengejar kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang meningkat lebih cepat.

Tekanan terhadap keuangan JKN semakin besar karena tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 725,3 juta pemanfaatan layanan JKN, meningkat dari 673,9 juta layanan

pada tahun sebelumnya. Rata-rata setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta layanan kesehatan yang dibiayai melalui program tersebut.

S e b a n y a k 3 8 p e r s e n pemanfaatan layanan berasal dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara ruang peningkatan penerimaan dari kelompok ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kemampuan fiskal negara.(eid,ist/dya)

Diskumperindag Hormati Penggeledahan Kejari Batu soal Dugaan Korupsi Pasar Among Tani



"Proses yang berjalan sudah sesuai prosedur s e b a g a i m a n a disampaikan Kasi Intel Kejari Batu. Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskumperindag Kota Batu, Dian Fachroni, Rabu (8/7/2026).

D i k e t a h u i , penggeledahan dilakukan di Kantor Diskumperindag Kota Batu dan Kantor UPT Pasar Induk Among Tani pada Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari

penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kios dan los Pasar Induk Among Tani tahun 2023.

Dalam kesempatannya, Dian menyatakan Diskumperindag siap memberikan dukungan kepada penyidik sesuai kewenangan yang dimiliki. Sikap kooperatif tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam

mendukung proses penegakan hukum.

"Selama proses berlangsung, kami berkomitmen memberikan kerja sama penuh kepada aparat penegak hukum. Dalam keterkaitan proses hukum yang ada, kami menghormatinya dan bersikap kooperatif sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi," katanya.

Di tengah proses penyidikan tersebut, Dian menilai tata kelola Pasar Induk Among Tani memang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pembinaan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga kepastian legalitas, penerapan standar operasional (SOP), serta peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan pasar.

"Pada prinsipnya, perbaikan tata kelola Pasar Induk Among Tani menjadi sebuah keniscayaan. Kami akan terus mendukung penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing institusi," ungkapnya. Pihaknya juga berharap proses hukum yang tengah berjalan dapat menjadi pijakan untuk menghasilkan perbaikan nyata dalam pengelolaan Pasar Induk Among Tani. Dengan demikian, pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat dapat

semakin baik.

"Semua ini demi perbaikan, terutama penataan dan penataan legalitas, SOP, serta SDM agar pengelolaan Pasar Induk Among Tani semakin baik," jelas Dian.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, Wisnu Sanjaya, membenarkan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Menurutnya, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan diputuskan setelah penyidik melakukan ekspose perkara.

"Perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan kios dan los Pasar Induk Among Tani Tahun 2023 resmi naik ke tahap penyidikan melalui mekanisme ekspose," ujar Wisnu, Rabu (8/7/2026).

Dijelaskannya, penyidikan perkara ini dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada akhir Juni 2026. Dalam penggeledahan tersebut, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batu menyita sejumlah barang bukti, mulai dari telepon seluler milik sejumlah aparat sipil negara (ASN) hingga berbagai dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara. (Santi/Dya)

DPRD Soroti SiLPA Kota Malang Naik 48% jadi Rp 303 M

MALANG - DPRD Kota Malang menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2025 yang mencapai sekitar Rp303 miliar. Angka tersebut naik sekitar 48,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami memandang SiLPA yang tinggi akibat realisasi belanja yang tidak sesuai target merupakan kondisi pelayanan publik yang gagal atau tertunda," ujar anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Akhdiyati Syabril Ulum, dalam penyampaian Pandangan Umum fraksi DPRD Kota Malang, Rabu (8/7/2026).

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan penjelasan secara mendalam mengenai penyebab SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.

"Kami tidak ingin terjebak pada anggapan bahwa SiLPA yang besar otomatis merupakan keberhasilan. Sebaliknya, Fraksi PKS berpandangan bahwa SiLPA harus dianalisis berdasarkan penyebabnya," jelasnya.

Ulum menegaskan, apabila SiLPA berasal dari efisiensi belanja yang memang direncanakan, maka hal tersebut patut diapresiasi. Namun, penilaian berbeda harus diberikan apabila besarnya SiLPA dipicu rendahnya penyerapan program, keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan, atau tidak terlaksananya kegiatan prioritas.

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA TA 2025. Mulai dari efisiensi anggaran, realisasi pendapatan yang melampaui target, hingga kendala regulasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).

Wahyu menyebut, Pemkot Malang akan menguraikan secara detail komponen pembentuk SiLPA tersebut. Terlebih, persoalan tingginya SiLPA menjadi salah satu hal yang banyak dipertanyakan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.

Terkait penilaian legislatif mengenai adanya perencanaan yang kurang optimal hingga menyebabkan SiLPA

membengkak, Wahyu memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi.

Menurutnya, masing-masing OPD memiliki kendala dalam merealisasikan target program dan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan munculnya regulasi baru maupun persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi sehingga anggaran tidak bisa dicairkan.

Selain itu, Wahyu menyebut adanya selisih nilai dalam pelaksanaan proyek maupun proses tender turut berkontribusi terhadap tingginya SiLPA.

"Ataupun juga ada selisih terkait proyek-proyek, tender itu juga. Itu yang bisa menjadikan SiLPA ini semakin tinggi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan sebagian komponen SiLPA sebelumnya telah



dapat diprediksi. Salah satunya berasal dari anggaran yang sempat dicadangkan untuk mengantisipasi wacana kenaikan gaji pegawai dari pemerintah pusat.

"Seperti saya sampaikan di paripurna awal, ternyata ada yang sempat dicadangkan untuk kenaikan gaji pegawai. Karena dari pusat ada wacana itu, disiapkanlah untuk gaji pegawai, ternyata tidak jadi naik. Itu salah satu komponen," ujar Amithya. (Santi/Dya)



GENCATAN SENJATA BERAKHIR! AS-IRAN SALING SERANG LAGI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (8/7), setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat menyusul serangan terhadap tiga kapal komersial di Selat Hormuz.

Amerika Serikat menuding Iran berada di balik serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Sebagai balasan, militer AS melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Iran. Padahal sebelumnya kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan aksi saling serang dan membuka jalur perundingan menuju gencatan senjata permanen.

Trump mengatakan insiden di Selat Hormuz membuatnya tidak lagi melihat peluang bagi kelanjutan kesepakatan tersebut. Berbicara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Turki, Trump menegaskan bahwa gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi.

"Sejauh yang saya khawatirkan, (gencatan senjata) itu telah usai," kata Trump, seperti dikutip AFP.

Ia juga menyampaikan pesimismenya terhadap proses negosiasi yang selama ini berlangsung.

"Cuma buang waktu bernegosiasi dengan mereka. Saya membiarkan negosiator luar biasa kami tetap berbicara jika mereka mau, tapi saya tak melihat hasilnya. Saya tak suka orang-orang (Iran) itu," ujar Trump.

Di sisi lain, kantor-kantor berita Iran pada Rabu melaporkan serangkaian ledakan di sekitar kawasan Selat Hormuz. Ledakan dilaporkan terjadi di Pulau Qeshm, Kota Sirik, Kota Bandar Abbas, hingga Kota Bushehr yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Iran.

Otoritas Iran menyebut serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat tersebut menewaskan seorang anggota Garda Revolusi Iran. Sementara itu, laporan media pemerintah Iran juga menyebut sejumlah wilayah pesisir menjadi

sasaran serangan udara.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi militernya menasar lebih dari 80 target di Iran. Sasaran tersebut meliputi sistem pertahanan udara, radar maritim, serta lebih dari 60 kapal kecil milik Garda Revolusi Iran.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut dilakukan untuk

melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran internasional yang melintasi Selat Hormuz.

"Serangan bertujuan menurunkan kemampuan Iran untuk menyerang jalur perdagangan internasional yang melewati koridor perdagangan internasional," demikian pernyataan Komando Pusat AS.

TIMELINE PERANG IRAN-AS-ISRAEL

- **28 Feb 2026**
AS-Israel menyerang Iran.
- **1 Mar**
Donald Trump mengklaim Ali Khamenei tewas.
- **9 Mar**
Trump menyebut perang segera berakhir.
- **14 Mar**
Iran menutup Selat Hormuz, memicu krisis minyak.
- **20 Mar**
Trump mengkritik NATO.
- **24 Mar**
AS membuka jalur diplomasi rahasia dengan Iran.
- **31 Mar-7 Apr**
Trump berganti dari menawarkan damai menjadi mengancam Iran.
- **8 Apr**
AS dan Iran sepakat gencatan senjata.
- **8 Jul**
Gencatan senjata berakhir AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan.



Di KTT Ankara, Trump Keluhkan Sikap NATO

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras kepada sekutu-sekutunya di Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki, Rabu (8/7). Trump menilai aliansi tersebut tidak memberikan dukungan yang memadai kepada Washington dalam menghadapi Iran, bahkan kembali mengungkit sengketa mengenai Greenland dan mengancam menghentikan hubungan dagang dengan Spanyol.

"Saya sangat kesal dengan NATO," kata Trump kepada wartawan di sela-sela KTT, seperti dikutip AFP.

Trump mengaku kecewa terhadap sikap NATO terkait Greenland serta minimnya dukungan terhadap operasi Amerika Serikat melawan Iran.

"Saya tidak senang dengan NATO karena tindakan mereka terkait Greenland, dan saya tidak senang dengan NATO karena fakta bahwa mereka tidak mau membantu kita menghadapi negara sponsor utama terorisme, yaitu Iran," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjelang sesi utama KTT.

Secara khusus, Trump juga melontarkan kritik kepada Spanyol yang dinilainya tidak memenuhi komitmen sebagai anggota NATO.

Ia bahkan mengancam akan menghentikan kerja sama perdagangan dengan negara tersebut.

"Spanyol adalah kasus yang sia-sia. Kita tidak ingin lagi melakukan bisnis perdagangan apa pun dengan Spanyol," kata Trump sembari meminta Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang mendampinginya, "Saya ingin Anda menghentikannya."

Trump kembali menegaskan penilaiannya terhadap Madrid.

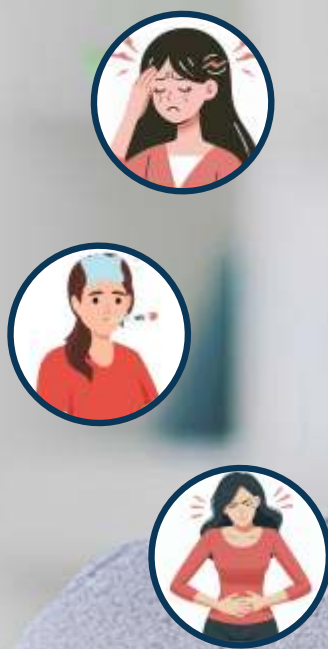
"Spanyol adalah mitra yang buruk di NATO. Mereka tidak



Trump saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki. (REUTERS)

berpartisipasi, mereka tidak membayar. Saya tidak ingin berurusan apa pun dengan Spanyol," tegasnya.

Di tengah kritik Trump terhadap sekutu-sekutunya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte justru menyatakan dukungannya terhadap langkah militer Amerika Serikat yang kembali menyerang Iran. Menurut Rutte, operasi tersebut merupakan respons yang diperlukan setelah Iran dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata. (wid ist/dya)



Metabolisme Melambat di Usia 30 Tahun? Ubah Pola Makan

Memasuki usia 30 tahun sering kali dianggap sebagai babak baru dalam kehidupan. Karier mulai mapan, tanggung jawab bertambah, dan gaya hidup pun mengalami perubahan. Namun, di balik berbagai pencapaian tersebut, tubuh juga mulai menunjukkan perubahan biologis yang tidak selalu disadari. Salah satunya adalah perlambatan metabolisme, yaitu proses tubuh mengubah makanan menjadi energi.

Banyak orang mengira penambahan berat badan setelah usia 30 tahun semata-mata disebabkan kurang berolahraga. Padahal, para ahli menyebut bahwa kombinasi antara penurunan massa otot, perubahan hormon, aktivitas fisik yang berkurang, serta pola makan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh menjadi penyebab utama.

Akibatnya, tubuh lebih mudah menyimpan lemak, sementara pembakaran kalori berlangsung lebih lambat dibandingkan saat usia 20-an.

Menurut National Institute on Aging (NIA), pertambahan usia menyebabkan komposisi tubuh berubah secara alami. Massa otot cenderung menurun, sedangkan persentase lemak meningkat apabila tidak diimbangi aktivitas fisik dan pola makan yang baik. Kondisi ini membuat kebutuhan energi tubuh juga berubah

sehingga kebiasaan makan pada usia muda belum tentu tetap sesuai ketika memasuki usia 30 tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengingatkan bahwa penyakit tidak menular seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan obesitas semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan erat dengan pola makan yang kurang sehat dan rendah aktivitas fisik.

Kabar baiknya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten terbukti memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan menjalani diet ekstrem dalam waktu singkat. Para ahli gizi merekomendasikan beberapa penyesuaian pola makan yang dapat membantu menjaga metabolisme tetap optimal sekaligus menurunkan risiko penyakit kronis.

Perbanyak Konsumsi Serat

Salah satu perubahan paling penting setelah usia 30 tahun adalah meningkatkan asupan serat. Sayangnya, banyak orang masih mengonsumsi serat jauh di bawah kebutuhan harian.

Serat memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain membantu melancarkan pencernaan, serat membuat rasa kenyang bertahan lebih

lama sehingga membantu mengendalikan nafsu makan. Serat larut juga memperlambat penyerapan glukosa sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil dan risiko diabetes tipe 2 dapat ditekan.

Kurangi Makanan Olahan

Kesibukan sering membuat banyak orang mengandalkan makanan instan atau makanan cepat saji. Padahal, sebagian besar makanan olahan mengandung natrium, gula tambahan, lemak jenuh, serta kalori yang cukup tinggi, sementara kandungan serat dan mikronutrientnya relatif rendah.

Konsumsi makanan ultra-proses secara berlebihan telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko obesitas, hipertensi, penyakit jantung, hingga diabetes.

Sebagai alternatif, biasakan memilih makanan yang lebih alami seperti sayuran segar, buah-buahan, ikan, telur, daging tanpa lemak, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Semakin sedikit proses pengolahan makanan, umumnya semakin baik kualitas gizinya.

Tingkatkan Asupan Protein Berkualitas

Memasuki usia 30 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot secara bertahap apabila tidak dirangsang melalui olahraga maupun konsumsi

protein yang cukup. Protein berfungsi memperbaiki jaringan tubuh, membangun otot, mendukung sistem imun, serta membantu mempertahankan metabolisme karena tubuh membutuhkan energi lebih besar untuk mencernanya dibandingkan karbohidrat sederhana.

American Society for Nutrition menyebutkan bahwa distribusi konsumsi protein secara merata pada setiap waktu makan lebih efektif membantu mempertahankan massa otot dibandingkan mengonsumsinya hanya pada satu waktu. Pilih sumber protein berkualitas seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, susu rendah lemak, yoghurt, tempe, tahu, maupun kacang-kacangan.

Batasi Gula Tambahan

Minuman manis, kopi kekinian, teh susu, minuman bersoda, hingga camilan tinggi gula sering menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Padahal, WHO merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan dibatasi kurang dari 10 persen dari total kebutuhan energi harian. Bahkan, pembatasan hingga di bawah lima persen dinilai memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar.

Asupan gula berlebihan meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga perlemakan hati. (iat/dya)

Elon Musk Siapkan 'Gugusan Bintang' Baru Bernama Starmind

Jika selama ini dunia mengenal Starlink sebagai jaringan satelit internet milik SpaceX, kini Elon Musk kembali memunculkan gagasan yang jauh lebih ambisius. Miliarder pendiri SpaceX tersebut mengungkapkan rencana membangun sebuah mega konstelasi satelit bernama Starmind, proyek yang digadang-gadang mampu menjadi pusat komputasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di luar angkasa.

Sekilas, nama Starmind mungkin terdengar seperti sebuah gugusan bintang baru di alam semesta. Namun kenyataannya, proyek ini bukanlah objek astronomi alami, melainkan jaringan satelit dalam jumlah sangat besar yang akan ditempatkan mengorbit Bumi. Jika terealisasi sesuai rencana, Starmind bahkan diperkirakan memiliki skala hingga 100 kali lebih besar dibandingkan Starlink yang saat ini telah

mengoperasikan ribuan satelit.

Melanjutkan Tradisi Nama 'Star'

SpaceX memang dikenal memiliki kebiasaan menggunakan awalan "Star" pada berbagai proyek besarnya. Setelah Starship, Starbase, Starlink, Starshield, hingga Starfall, kini giliran Starmind yang masuk dalam keluarga besar proyek luar angkasa perusahaan tersebut.

Penamaan itu bukan sekadar identitas, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang SpaceX dalam membangun ekosistem teknologi berbasis antariksa. Jika Starlink difokuskan sebagai penyedia layanan internet global melalui satelit orbit rendah, maka Starmind diarahkan menjadi infrastruktur komputasi AI

yang beroperasi langsung di luar angkasa.

Pusat Data AI Mengorbit Bumi

Berbeda dari satelit komunikasi pada umumnya, Starmind dirancang sebagai orbital data center, yakni pusat data yang berada di orbit Bumi.

Konsep ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kecerdasan buatan. Selama ini, pusat data AI dibangun di daratan dan membutuhkan listrik dalam jumlah sangat besar untuk menjalankan ribuan prosesor sekaligus sistem pendinginnya. Seiring meningkatnya kebutuhan komputasi AI, konsumsi energi pusat data juga terus melonjak.

Melalui Starmind, SpaceX ingin memindahkan sebagian kebutuhan komputasi tersebut ke luar angkasa.

Andalkan Energi Matahari

Salah satu alasan utama di balik proyek ini adalah melimpahnya energi matahari di luar atmosfer Bumi. Di orbit, panel surya tidak terhalang cuaca, awan, maupun pergantian siang dan malam seperti di permukaan Bumi. Kondisi tersebut

memungkinkan satelit memperoleh pasokan energi yang lebih stabil untuk menjalankan berbagai sistem komputasi. Menurut Elon Musk, pemanfaatan tenaga surya secara langsung dengan biaya operasional yang relatif rendah berpotensi mengubah cara manusia meningkatkan kapasitas komputasi AI dalam skala besar.

Konsep tersebut juga diyakini mampu mengurangi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pusat data konvensional, mulai dari keterbatasan pasokan listrik hingga kebutuhan pendinginan yang sangat besar.

Target 1 Juta Satelit

Ambisi terbesar proyek ini terletak pada skalanya. SpaceX disebut menargetkan sekitar satu juta satelit untuk membentuk konstelasi Starmind. Angka tersebut jauh melampaui jumlah satelit Starlink yang saat ini telah menjadi konstelasi satelit terbesar di dunia.

Apabila target tersebut benar-benar tercapai, Starmind akan menjadi salah satu infrastruktur buatan manusia terbesar yang pernah ditempatkan di orbit Bumi.

Besarnya jumlah satelit diharapkan mampu membangun jaringan komputasi yang saling terhubung, sehingga proses pengolahan data AI dapat dilakukan secara terdistribusi dengan kapasitas yang sangat besar. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Underpainting Makeup, Teknik Viral Bikin Hasil Menyatu dengan Kulit

Dunia kecantikan selalu menghadirkan tren baru yang menarik untuk dicoba. Setelah beberapa tahun diramaikan dengan glass skin, latte makeup, hingga clean girl makeup, kini perhatian para beauty enthusiast tertuju pada teknik underpainting makeup.

Teknik rias yang sebenarnya sudah lama digunakan oleh para makeup artist profesional ini kembali menjadi perbincangan setelah banyak kreator kecantikan di media sosial membagikan hasil riasan yang terlihat begitu halus, ringan, dan seolah menyatu dengan kulit.

Sekilas, hasil akhir underpainting memang tampak berbeda dibandingkan teknik makeup konvensional. Wajah terlihat lebih berdimensi, pipi tampak merona alami, kontur wajah lebih tegas, namun tanpa garis-garis contour yang mencolok.

Efeknya menyerupai kulit sehat yang memang secara alami memiliki bayangan dan cahaya, bukan seperti wajah yang dilapisi banyak produk kosmetik.

Rahasia utama teknik ini terletak pada urutan pengaplikasian produk. Jika biasanya foundation menjadi langkah pertama sebelum contour, blush, dan highlighter, underpainting justru membalik proses tersebut. Produk-produk pembentuk dimensi wajah diaplikasikan terlebih dahulu, kemudian seluruhnya disatukan menggunakan lapisan foundation yang tipis.

Hasilnya adalah tampilan yang lebih lembut, natural, dan memberikan efek airbrushed tanpa terlihat berat. Tak heran apabila teknik ini menjadi favorit banyak orang yang menginginkan tampilan no makeup sehari-hari yang tetap terlihat segar sepanjang hari.

Persiapan Kulit Harus Optimal

Keberhasilan underpainting tidak hanya ditentukan oleh teknik blending, tetapi juga kondisi kulit sebelum makeup diaplikasikan. Karena itu, proses skin prep menjadi tahap yang tidak boleh dilewatkan.

Mulailah dengan membersihkan wajah agar sisa minyak dan kotoran tidak mengganggu daya rekat makeup. Setelah itu, gunakan pelembap yang sesuai dengan jenis kulit untuk memastikan permukaan kulit tetap

terhidrasi. Kulit yang lembap akan membuat produk krim lebih mudah dibaurkan dan menghasilkan tampilan yang jauh lebih halus.

Bila diperlukan, tambahkan primer untuk membantu menyamarkan pori-pori sekaligus memperpanjang ketahanan makeup. Langkah sederhana ini akan membuat foundation lebih mudah menyatu dengan kulit sehingga hasil akhirnya tampak lebih natural.

Contour Jadi Langkah Pertama

Berbeda dengan teknik makeup yang umum dilakukan, underpainting mengawali proses rias dengan mengaplikasikan contour berbentuk krim atau cair.

Produk diaplikasikan pada area yang secara alami membentuk bayangan, seperti tulang pipi, garis rahang, sisi hidung, dan bagian luar dahi. Tujuannya bukan menciptakan garis tegas, melainkan membentuk dimensi wajah secara lembut.

Karena nantinya akan tertutup lapisan foundation tipis, contour tidak perlu diaplikasikan terlalu banyak.

Lanjut dengan Blush dan Highlighter

Setelah contour selesai dibaurkan, langkah berikutnya adalah menggunakan cream blush dan liquid highlighter. Bagi sebagian orang, tahapan ini mungkin terasa tidak biasa karena blush biasanya diaplikasikan di atas foundation. Namun, justru di

sinilah letak keunikan underpainting. Blush yang ditempatkan sebelum foundation akan memberikan efek pipi merona dari dalam kulit, bukan sekadar warna yang menempel di permukaan wajah.

Sementara itu, highlighter yang diaplikasikan lebih awal akan menghasilkan kilau alami tanpa terlihat terlalu mengilap.

Teknik ini membuat transisi antara contour, blush, dan highlight menjadi jauh lebih halus sehingga wajah tampak hidup dengan dimensi yang natural.

Cerahkan dengan Concealer

Langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan concealer pada area-area tertentu yang membutuhkan pencahayaan lebih. Gunakan concealer yang memiliki warna sekitar satu hingga dua tingkat lebih terang dibanding warna kulit. Aplikasikan di bawah mata untuk menyamarkan lingkaran hitam, pada batang hidung agar terlihat lebih tinggi, di tengah dahi, dagu, serta sudut luar mata bila ingin memberikan efek wajah yang lebih terangkat.

Karena nantinya seluruh wajah akan kembali dilapisi foundation tipis, hasil concealer akan tampak lebih menyatu dan tidak menciptakan kontras berlebihan.

Foundation Tipis

Tahap inilah yang menjadi pembeda utama underpainting dengan teknik makeup biasa. Alih-alih menggunakan foundation dengan coverage tinggi, teknik ini justru menyarankan penggunaan foundation ringan atau sheer foundation. Foundation diaplikasikan secara tipis menggunakan spons atau kuas dengan cara ditekan perlahan, bukan digeser.

Teknik menepuk lembut membantu seluruh lapisan contour, blush, dan concealer tetap berada di tempatnya sambil menyatu dengan foundation.

Akhiri dengan Setting Makeup

Agar makeup tetap bertahan sepanjang hari, langkah terakhir adalah melakukan setting. Bagi pemilik kulit berminyak, setting powder tipis dapat diaplikasikan pada area yang mudah mengilap, seperti dahi, hidung, dan dagu.

Sementara bagi pemilik kulit normal hingga kering, penggunaan setting spray dapat membantu mempertahankan kelembapan sekaligus membuat seluruh lapisan makeup semakin menyatu. (ist/dya)



Utak-atik Biaya Haji...dari hal 1

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyodorkan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Nilainya mencapai Rp107,34 juta per jemaah. Angka ini naik Rp19,93 juta dibanding ongkos haji 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyusun kalkulasi ini dengan asumsi makro yang ketat. Nilai tukar dipatok Rp17.500 per dollar Amerika Serikat dan Rp4.666,67 per riyal Arab Saudi. Dampak pelemahan rupiah memicu lonjakan biaya di tingkat hulu.

Dari total pagu Rp107,34 juta, komponen luar negeri mendominasi. Biaya operasional di Arab Saudi menyedot dana Rp60,89 juta atau 56,73 persen. Sisanya, Rp46,44 juta atau 43,27 persen, dialokasikan untuk komponen dalam negeri, termasuk tiket penerbangan.

Kenaikan ongkos dipicu oleh pembengkakan tarif avtur global. Harga sewa pemondokan di Makkah dan Madinah juga merangkak naik. Ditambah lagi dengan penyesuaian tarif paket pelayanan puncak haji (masyair) oleh otoritas lokal.

Standardisasi pelayanan ikut diperketat. Kemenhaj berkaca pada evaluasi musim haji lalu. Saat itu, angka kematian jemaah menembus 350 jiwa.

Pemerintah kini memperkuat sejumlah lini. Dana terserap untuk program manasik kesehatan sejak pra-keberangkatan. Ada pula pengadaan konsumsi siap saji (ready to eat), pembenahan zonasi maktab di Madinah, hingga jaminan visa bagi jemaah pengganti.

Meski total biaya membubung, Kemenhaj mengutak-atik skema proteksi. Tujuannya agar jemaah tidak terpukul gejolak harga. Pemerintah menawarkan reformasi radikal pada struktur pembiayaan.

Skema musim lalu diubah total. Pada haji 2026, jemaah menanggung beban mayoritas. Komposisinya jemaah membayar 61 persen, BPKH menyubsidi 39 persen.

Untuk musim haji 2027, Kemenhaj mengusulkan formula 40:60. Jemaah hanya dibebankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 40 persen. Nilainya berkisar Rp42,8 juta.

Sisa 60 persen biaya didelegasikan ke pihak lain. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib menopang Rp64,2 juta per orang. Dana diambil dari pos Nilai Manfaat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak optimis formula ini bisa dieksekusi. Pemerintah mengantongi bantalan likuiditas yang tebal. Dana bersumber dari sisa efisiensi anggaran masa pandemi.

"Kalau hitung-hitungan kami bisa. Kenapa bisa? Karena tahun 2020 kita kan enggak memberangkatkan jemaah haji. Berarti ada saving yang harusnya keluar sekitar Rp18 triliun, itu ada saving di 2020," ujar Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Pembatalan keberangkatan juga terjadi pada musim berikutnya. Hal itu memperpanjang napas fiskal pemerintah.

"Tahun 2021 kita juga tidak memberangkatkan jemaah haji. Berarti ada saving kurang lebih Rp18 triliun," kata Dahnil.

Total simpanan dari dua tahun tersebut menyentuh Rp36 triliun. Katup penyelamat ini diperkuat oleh kondisi operasional haji 2022. Saat itu, kuota Indonesia dipangkas separuh akibat pembatasan Covid-19.

"Tahun 2022 kita memberangkatkan 50 persen dan itu waktu itu komposisinya biaya haji 59 persen ditanggung oleh BPKH, sisanya ditanggung oleh jemaah. Jadi komposisi itu sangat memungkinkan," ucap Dahnil.

Intervensi masif ini dipandang perlu untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, draf anggaran ini belum final. Statusnya masih berupa pagu indikatif usulan eksekutif.

Bola kini berada di tangan parlemen. Komisi VIII DPR RI bersiap membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji. Anggota legislatif akan menyisir ulang setiap pos anggaran guna mencari celah efisiensi. Pemerintah berjanji akan mempertahankan skema proteksi ini di meja perundingan.

"Kami ingin balik. Jadi yang dibayarkan jemaah itu 40 persen, yang ditanggung oleh nilai manfaat itu 60 persen. Itu yang kami ajukan ke DPR, ke Komisi VIII. Jadi kami akan berjuang di DPR supaya teman-teman di DPR bisa menyetujui bahwasanya yang ditanggung jemaah harus lebih ringan," kata Dahnil.

Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta memicu sorotan di DPR. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah mengkaji ulang besaran biaya tersebut agar tidak menambah beban calon

jemaah.

Menurut Maman, usulan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia masih bersifat awal. Angka itu belum menjadi keputusan final karena masih akan dibahas bersama DPR. Ia meminta kementerian lebih dulu mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga biaya yang dibayar jemaah dapat ditekan.

Ia juga menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umrah harus mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, tidak hanya memperbaiki layanan. Pemerintah, kata dia, perlu memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia untuk memperoleh biaya yang lebih kompetitif dari Arab Saudi.

Menurut Maman, upaya tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi, mulai dari akomodasi, catering, hingga transportasi. Langkah itu dinilai sejalan dengan arahan Presiden agar ongkos haji semakin terjangkau bagi masyarakat. (wid,rls,ant,ist/dya)

Deadline DP Haji 15 Juli 2026 Sebesar Rp 4 Triliun

PEMERINTAH meminta persetujuan DPR untuk mentransfer uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 sebesar sekitar Rp4 triliun kepada Pemerintah Arab Saudi. Dana itu harus disetor paling lambat 15 Juli 2026 sebagai syarat awal penyelenggaraan haji tahun depan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan setoran dilakukan ke sistem e-wallet milik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Nilainya mencapai sekitar 828 juta riyal Saudi atau setara kurang lebih Rp4 triliun.

Menurut Dahnil, pembayaran uang muka tersebut bersifat wajib. Seluruh negara pengirim jemaah haji diminta memenuhi ketentuan itu sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Saldo dalam e-wallet nantinya digunakan untuk membayar berbagai layanan penyelenggaraan haji ketika proses pemesanan akomodasi dan layanan lain dilakukan.

Ia menjelaskan mekanisme penyelenggaraan haji berlangsung melalui skema government to government (G to G). "Pemerintah Indonesia bertransaksi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi akan menunjuk perusahaan penyedia

layanan atau syarikah yang melayani kebutuhan jemaah," katanya.

Karena itu, pemerintah meminta persetujuan DPR agar dana uang muka dapat segera ditransfer. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemesanan layanan haji 2027 tidak terlambat.

Di sisi lain, pemerintah masih mengevaluasi penyedia layanan haji untuk musim 2027. Otoritas Arab Saudi mengusulkan seluruh layanan ditangani satu syarikah. Namun pemerintah Indonesia berharap tetap dapat menggunakan dua syarikah. Menurut Dahnil, skema itu memungkinkan adanya persaingan layanan sekaligus menjadi dasar membandingkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.

Perketat Syarat Sehat

Pemerintah juga akan memperketat penerapan istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji mulai musim haji 2027. Pemerintah menyiapkan sistem pemantauan kesehatan sejak jauh sebelum keberangkatan agar kondisi jemaah dapat dipastikan layak secara medis.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Dani Pramudya, mengatakan pembinaan kesehatan tidak dimulai saat jemaah tiba di Tanah Suci. Proses itu dilakukan

sejak masih berada di Indonesia melalui pemeriksaan dan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan.

"Kementerian tengah menyusun sistem pemantauan yang memungkinkan kondisi kesehatan calon jemaah diawasi hingga satu tahun sebelum keberangkatan. Melalui pemantauan berkala, faktor-faktor risiko dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum jemaah berangkat ke Arab Saudi," jelasnya.

Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada calon jemaah yang memiliki penyakit penyerta, seperti gangguan jantung, hipertensi berat, dan gagal ginjal. Kelompok ini akan mendapat pembinaan lebih intensif melalui program manasik kesehatan agar mampu menjaga kebugaran dan mengendalikan penyakit selama menjalankan ibadah haji.

Dalam pembahasan bersama Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, muncul usulan memperkuat kerja sama dengan dinas kesehatan di daerah serta memaksimalkan jejaring rumah sakit. Sinergi tersebut diharapkan membentuk sistem pelayanan kesehatan haji yang lebih terintegrasi, mulai dari pembinaan, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji. (wid,ant,dya)

RUPIAH KEOK LAGI, PURBAYA PILIH IRIT BICARA

Nilai tukar rupiah keok lagi terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Rabu (8/7/2026), mata uang Garuda menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, mencerminkan meningkatnya tekanan di pasar valuta asing domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih irit bicara dan meminta Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang menjelaskan tren tersebut.

Pelempahan rupiah tersebut mendapat perhatian setelah dolar AS bergerak menguat sejak awal perdagangan. Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai kondisi nilai tukar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih memberikan jawaban singkat. Ia menyebut

persoalan nilai tukar merupakan kewenangan bank sentral.

Saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/7/2026), Purbaya tidak memberikan banyak penjelasan mengenai penyebab maupun langkah pemerintah menghadapi tekanan terhadap rupiah.

"Oh itu tanyakan ke bank sentral kita lah. Saya pikir bank sentral ngerti lah," ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah menjadi bagian dari mandat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah, melalui Kementerian

PERGERAKAN RUPIAH & IHSG

Rabu, 8 Juli

- Nilai Tukar Rupiah
Rp 17.958 per Dolar AS
- Level Penutupan IHSG
5.873,37

Selasa, 7 Juli

- Nilai Tukar Rupiah
Rp17.970 – Rp17.990 per Dolar AS
- Level Penutupan IHSG
5.986,55

5 - 6 Juli

- Nilai Tukar Rupiah
Rp18.067 per Dolar AS
- Level Penutupan IHSG
5.920,93

2 - 4 Juli

- Nilai Tukar Rupiah
Rp17.787 – Rp17.987 per Dolar AS.
- Level Penutupan IHSG
5.875,78

Akhir Juni - 1 Juli

- Nilai Tukar Rupiah
Rp17.998 per Dolar AS
- Level Penutupan IHSG
5.700 – 5.750

Keuangan, lebih berfokus pada pengelolaan kebijakan fiskal dan menjaga kesehatan APBN.

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS tercatat menguat terhadap rupiah sejak pembukaan perdagangan. Pada pukul 09.00 WIB, dolar AS bergerak naik 0,06 persen ke level Rp 17.990.

Pergerakan tersebut kemudian berlanjut hingga menembus level Rp 18.000. Sekitar pukul 11.32 WIB, dolar AS menguat 0,14 persen ke posisi Rp 18.005.

Sehari sebelumnya, Selasa (7/7/2026), dolar AS telah ditutup pada level Rp 17.995. Kenaikan tersebut membuat tekanan terhadap rupiah semakin terlihat di pasar spot domestik.

Pada akhir perdagangan, rupiah ditutup melemah 34 poin atau sekitar 0,19 persen ke level Rp 18.014 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia berada pada posisi Rp 18.005 per dolar AS.

Pelempahan rupiah terjadi ketika dolar AS juga menunjukkan penguatan terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Mata uang Paman Sam tercatat menguat terhadap euro sebesar 0,02 persen, yen Jepang 0,17 persen, serta dolar Australia sebesar 0,19 persen.

Penguatan juga terjadi terhadap franc Swiss sebesar 0,01 persen. Namun, dolar AS melemah tipis terhadap poundsterling Inggris sebesar 0,03 persen dan dolar Kanada sebesar 0,04 persen. (tin,kum,cnbc,ist/dya)

BEI Jawab soal Status Pasar Saham Indonesia Terancam Turun

BURSA Efek Indonesia (BEI) mulai melakukan komunikasi dengan penyedia indeks global S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) menyusul adanya potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market atau pasar berkembang menjadi frontier market atau pasar perbatasan.

Langkah komunikasi tersebut dilakukan setelah S&P DJI memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauan (watchlist) untuk evaluasi klasifikasi pasar pada 2027. Status Indonesia saat ini masih berada dalam kategori emerging market, tetapi terdapat peluang perubahan status apabila sejumlah persoalan yang menjadi perhatian investor global tidak segera diselesaikan.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari S&P DJI terkait pembahasan tersebut. Menurut dia, BEI telah menghubungi lembaga penyedia indeks tersebut untuk

membicarakan berbagai isu yang menjadi perhatian.

"Sejauh ini, tadi pagi saya cek, kami masih menunggu jawaban dari mereka jadi kami sudah kontak cuma masih menunggu jawaban dari S&P," ujar Irvan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Selain berkomunikasi dengan S&P DJI, BEI juga terus melakukan dialog dengan sejumlah penyedia indeks global lain, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan FTSE Russell. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap memenuhi standar internasional dan mempertahankan kepercayaan investor global.

Irvan menjelaskan, BEI terus menjalankan berbagai langkah reformasi pasar modal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perdagangan saham domestik.

Sejumlah kebijakan yang telah

dilakukan antara lain penguatan aturan mengenai batas minimum saham beredar di publik (free float) serta peningkatan transparansi terkait kepemilikan saham, khususnya pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi.

Menurut Irvan, meskipun berbagai rekomendasi perbaikan telah dijalankan, BEI masih terus berdiskusi mengenai langkah konkret yang dapat menunjukkan kepada investor bahwa reformasi pasar modal Indonesia berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengatakan sejumlah kebijakan membutuhkan waktu untuk memberikan dampak terhadap pasar. Salah satunya adalah pemenuhan ketentuan free float yang ditargetkan selesai pada 2029.

"Kendati semua proposal reformasi pasar modal telah dijalankan, otoritas bursa terus mendiskusikan berbagai aksi nyata yang bisa dilakukan untuk meyakinkan pasar bahwa perbaikan betul-betul dilaksanakan," kata Irvan. (wid,ist/dya)